



HARIAN

LENTERA

KORAN DIGITAL
LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

Edisi Jumat, 24 November 2023

Lentera TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK TAK MALU Firli Melawan, Pemecatan di Tangan Jokowi

Wajah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak penuh coreng-moreng. Tak sekadar kasus etik, kini sang pucuk pimpinan, Firli Bahuri juga terjerat pidana. Ketua KPK jilid V ini resmi dijerat sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ironisnya, para wakilnya tampak berupaya melakukan pembelaan melalui narasi yang dilontarkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tidak malu dengan kondisi tersebut. Sementara wakil komisi anti-rasuah yang lain, Johanis Tanak menegaskan selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, pihak Firli merasa keberatan dengan penetapan tersangka itu. Firli bakal melawan dengan mengajukan praperadilan. Polisi dinilai memaksakan kasus dan tak pernah menunjukkan secara gamblang alat bukti dimiliki. Apapun hasil akhirnya, tercatat sebuah sejarah buruk bagi bangsa.

(Baca Hal 11)

**GOVERNMENT (Hal.2)
Kasus Cacar Monyet
di RI Mendaki ;
Total 57 Orang Positif,
2 Ada di Jatim**

DAFTAR LENGKAP BARANG SITAAN POLISI DALAM KASUS FIRLI

1. Dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023
2. Dokumen berupa turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021.
3. Pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh saksi SYL saat pertemuan di GOR Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022.
4. Satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI.
5. Ikhtisar LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai tahun 2022.
6. Ponsel sebanyak 21 unit dari para saksi
7. Akun email sebanyak 17 akun
8. Flash disk sebanyak 4 unit
9. 2 Unit mobil
10. 3 e-money
11. Remot keyless bertuliskan Land Cruiser
12. 1 buah dompet yang bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat yang berisikan holiday getaway voucher Rp 100 ribu spiralcare traveloka
13. 1 buah anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya atau barang bukti lainnya.

Kasus Cacar Monyet di RI Mendaki Total 57 Orang Positif, 2 Ada di Jatim



Dua petugas kesehatan menyosialisasikan penyakit cacar monyet kepada masyarakat di Puskesmas Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. ant

JAKARTA - Kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia makin mendaki. Terbaru ada 57 orang tertular dan 1 orang meninggal.

Hal ini disampaikan Direktur Surveilans Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, Kamis (23/11/2023).

"Provinsi terbanyak melaporkan adalah Jakarta dengan 42 kasus. 100 persen laki-laki," kata Farchanny.

Sementara itu, Banten dan Jawa Barat menyusul sebagai provinsi dengan kasus terbanyak, yakni masing-masing enam kasus. "Kemudian Jawa Timur dengan total dua terkonfirmasi dan Provinsi Kepulauan Riau ada satu kasus terkonfirmasi," ujar dr. Achmad.

Kemenkes RI melaporkan bahwa seluruh pasien cacar monyet adalah laki-laki. Secara rinci, sebanyak 13 pasien adalah berusia 18 hingga 24 tahun, 17 pasien berusia 25 hingga 29 tahun, 24 pasien berusia 30 hingga 39 tahun, 2 pasien berusia 40 hingga 49 tahun, dan 1 pasien sisanya berusia di atas 50 tahun.

"Dari seluruh 57 kasus ini, orientasi seksual pada sebagian besar penderita adalah LSL (Lelaki Seks Lelaki), yakni ada 35 kasus. Kemudian yang orientasinya biseksual ada 11 kasus, dan heteroseksual 7 kasus," jelas dr. Achmad.

Menurut dr. Achmad, sebagian besar kasus mpox memiliki kondisi penyerta lebih dari satu penyakit. Adapun, 39 pasien adalah Orang Dengan HIV (ODHIV). Sementara itu, 16 pasien sisanya adalah penderita sifilis.

"Maka dari itu, kiranya masyarakat perlu melakukan praktik hubungan seksual yang aman, termasuk membatasi jumlah pasangan seksual. Kami juga menganjurkan untuk setia kepada masyarakat," tegas dr. Achmad.

Sebagai informasi, cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus monkeypox tergolong ke dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae.

Mengutip dari laman resmi WHO, penyakit cacar monyet dapat ditularkan kepada manusia melalui kontak fisik dengan pasien terinfeksi, benda yang terkontaminasi, atau hewan yang terinfeksi. "Penularan bisa terjadi melalui kontak face-to-face (berbincang atau hembusan napas), droplet, sentuhan, ciuman, atau hubungan seksual," dikutip dari WHO..

Sementara penularan dari hewan bisa terjadi saat berburu, menguliti, atau memasak hewan yang terinfeksi. Untuk penularan melalui benda bisa terjadi lewat sprai, pakaian, atau jarum yang terkontaminasi.

Ibu hamil juga dapat menularkan virus penyebab penyakit cacar monyet kepada bayi yang belum lahir. "Penyakit cacar monyet dapat dicegah dengan menghindari kontak fisik dengan seseorang yang terjangkit. Selain itu, vaksinasi juga dapat membantu mencegah infeksi bagi orang yang berisiko," tulis WHO.

Satu Orang Meninggal

Di sisi lain, Spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Lie Khie

Chen, SpPD-KPTI mengungkap kronologi meninggalnya pasien Mpox di DKI Jakarta. Pria tersebut semula sempat mendapatkan perawatan di beberapa RS sebelum akhirnya mendapat rujukan ke RSCM.

"Jadi saya bisa gambarkan, kami menerima rujukan, pasien sudah dirawat di RSPi Sulianti Saroso, dan sebelumnya juga pasien sempat berobat di RS lain," bebernya dalam konferensi pers Kamis (23/11/2023).

Beberapa pekan sebelum dirujuk ke RSCM, pria yang tidak disebutkan namanya ini mengalami masalah pencernaan yakni terjadinya gangguan pada aliran usus. "Ada sumbatan, perlu operasi sampai dirujuk ke RSCM, dan ini tidak bisa dilakukan di RS sebelumnya," terangnya.

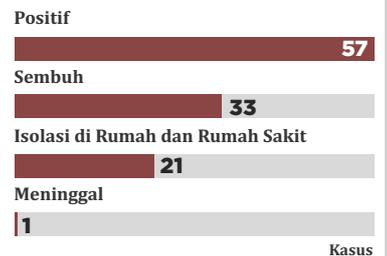
Pasca menjalani operasi, kondisi pasien dilaporkan relatif stabil. Sayangnya, akibat komorbid yang dimiliki pasien relatif banyak, disertai infeksi Mpox dengan banyak lesi, pria tersebut mengalami komplikasi.

"Karena komorbid lainnya, kondisi pasien, juga proses infeksi Mpox lesi cukup banyak dan berat, ini terjadi kondisi yang berkomplikasi sehingga artinya dalam perawatan dua minggu timbul komplikasi pada paru," beber dr Kie Chen.

"Sangat berat, kami sudah berupaya untuk mengatasi kondisi pasien yang sangat berat dan tidak bisa tertolong, upaya medis sudah dilakukan dan dimaksimalkan tetapi banyak komorbid lain," lanjutnya. Artinya, sejumlah komorbid tersebut yang memperberat kondisi pasien sehingga tidak tertolong. (wid,rls,ist/dya)

DATA-DATA TERBARU TERKAIT KASUS CACAR MONYET DI INDONESIA:

TOTAL KASUS:



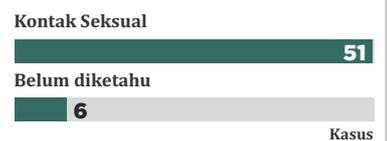
DAERAH PERSEBARAN:



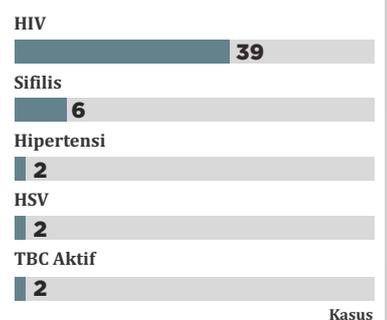
ORIENTASI SEKSUAL:



CARA PENULARAN:



BERIKUT DATA DETAILNYA:



DPR Diancam soal RUU Desa Jika Tak Disahkan 5 Desember, Perangkat Desa Ogah Terlibat Pemilu 2024

JAKARTA - Ribuan kepala desa menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU Desa. DPR RI diberi tenggat waktu sampai 5 Desember 2024. Jika tidak juga disahkan, seluruh kepala desa di daerah tidak akan mau terlibat dalam Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskan oleh Pembina Lembaga Organisasi Desa Bersatu Muhammad Asri Anas, kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam audiensi di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023). "Tanggal 5 Desember, kita sepakat untuk kumpul seluruh desa di seluruh Indonesia di Senayan. Hanya ada dua, mendesak ribut atau yang kedua datang mensyukuri hasil yang dikerjakan teman-teman DPR," kata Asri Anas.

Asri Anas mengatakan, jika syarat tersebut tidak terpenuhi oleh DPR RI, maka seluruh kepala desa di Indonesia mengancam tidak akan terlibat dalam Pemilu 2024. "Kemudian yang kedua, jika tanggal 5 tidak dilakukan kami sepakat untuk tidak terlibat sebagai tugas pembantuan di Pemilu 14 Februari 2024," tegasnya.

Menurutnya, Pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus jika tidak ada kepala desa yang terlibat di dalamnya. "Kami tahu, tidak ada pemilu yang bisa berjalan di desa-desa, kalau kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa tidak terlibat," tandasnya.

Diketahui, 8 organisasi kelompok desa yang mengatasnamakan diri sebagai 'Desa Bersatu' menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/11/2023). Mereka menuntut Revisi UU Desa segera disahkan paling lambat pada 5 Desember 2023. Ratusan peserta aksi itu terdiri dari kepala desa dan perangkatnya dari berbagai daerah.

Mereka kompak mengenakan seragam cokelat. Ada juga yang mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Apdesi' di bagian punggung. Dua mobil komando terparkir di Jalan Gatot Soebroto tepat di depan kompleks parlemen. Akibatnya, Jalan Gatot Subroto ke arah Slipi pun ditutup.

Tampak spanduk dibentangkan di pagar gedung DPR. Di salah satu spanduk, mereka menolak tugas perbantuan di Pemilu 2024 jika RUU Desa tak disahkan sebelum tenggat waktu yang mereka tentukan. "Desa menuntut Revisi UU Desa disahkan 5 Desember 2023," tulis salah satu spanduk yang terpasang.

Beberapa di antara organisasi kelompok desa yang tergabung dalam Desa Bersatu ialah DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPD), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).



Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). (ist)

Fraksi di DPR menyetujui semua poin dalam revisi UU. Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun dalam tiga periode.

Lalu, usulan kenaikan dana desa menjadi 20 persen. Kemudian, penghapusan pemilihan lawan kotak kosong bagi calon tunggal menjadi aklamasi melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya, RUU Desa akan dibahas bersama pemerintah.

Belum Bisa Diputuskan

Sementara, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berjanji dalam waktu dekat akan melaporkan permintaan para perangkat desa kepada Pimpinan DPR agar segera membahas RUU Desa.

Jaminan itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, ketika menemui perwakilan kepala desa. "Saya bersama Pak Baidowi, setelah pertemuan ini akan segera berkomunikasi dengan Pimpinan DPR, segera meminta dilakukan rapat, untuk menentukan rapat konsultasi," ujar Supratman di hadapan belasan perwakilan kepala desa.

Dia hanya meminta waktu kepada para kepala desa untuk bernegosiasi dan melaporkan kepada Pimpinan DPR RI terkait tuntutan. "Saya kasih jaminan, kalau hari ini Baleg diberi tugas untuk itu, paling tidak dua hari kami selesaikan. Kalau Baleg yang ditugaskan," imbuhnya.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menambahkan, selama ini DPR belum kembali membahas RUU Desa lantaran belum mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan pembahasan.

"Problemnya adalah kami tidak boleh minta barang itu. Karena belum masuk ke penugasan kita di Baleg. Kami berharap akan disampaikan konsultasi dengan Pimpinan DPR, untuk menyampaikan aspirasi ini supaya sesegera mungkin, apa dibahas di Baleg atau AKD (alat kelengkapan dewan) yang lain," tutupnya.

Sebelumnya, Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka membocorkan ada upaya memaksakan revisi UU Desa dikebut pada bulan November 2023. Perpanjangan itu menyangkut perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Rieke mengungkapkan, ada pertemuan perangkat desa di Istana Negara untuk membahas wacana perpanjangan masa jabatan kades beberapa pekan lalu.

Namun, belakangan muncul dukungan dari 8 organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju memberikan dukungan kepada paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran. "Saya mendapatkan informasi akan dikejar November ini harus selesai revisi UU Desa," kata Rieke.

Rieke menduga ada indikasi malapraktik pembahasan aturan bila revisi UU Desa dipaksakan secepat mungkin bulan ini. Sebab, proses pembahasan suatu UU butuh mekanisme seperti meminta masukan dan pendalaman dari ahli hingga masyarakat.

"Kalau ini arahnya untuk perpanjangan masa jabatan yang dibargainkan dengan kemenangan calon tertentu, kalau boleh saya dengan segala kerendahan hati saya, jangan lah Pak Jokowi, jangan," tutup Rieke. (wid,rls,ist/dya)

19 POIN PERUBAHAN UU DESA:

1. Penyisipan dua pasal di antara Pasal 5 dan Pasal 6, yakni Pasal 5a tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi dan atau dana rehabilitasi dan Pasal 5b tentang pengembangan atau pemanfaatan suaka oleh desa

- Perbaikan rumusan penjelasan Pasal 8 ayat 3 huruf b tentang dana operasional.
- Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.
- Pasal 26 ayat (4) tentang kewajiban kepala desa untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.
- Pasal 27 perubahan rumusan substansi tentang kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajibannya.
- Pasal 27 menambah substansi syarat calon kepala desa, yakni tidak pernah sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan.
- Penyisipan satu pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35, yakni Pasal 34a tentang jumlah calon kepala desa.
- Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- Penyisipan satu pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51, yakni pasal 50a tentang hak perangkat desa.
- Perubahan pasal 56 tentang masa keanggotaan badan permusyawaratan desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.
- Pasal 62, tentang penambahan hak badan permusyawaratan desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatannya, yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah.
- Penyisipan satu pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73, yakni pasal 72a tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa.
- Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga ataupun rukun warga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, utk jangka waktu 9 tahun.
- Penyisipan satu pasal di antara pasal 87 dan pasal 88 yakni pasal 87a tentang Bumdes yang dikelola secara profesional dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi
- Pasal 118 tentang aturan peralihan sebagai berikut:
 - Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat dua periode sebelumnya Undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan UU ini.
 - Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri satu periode lagi
 - Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat untuk periode ketiga, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan Undang-undang ini
 - Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-undang ini.
 - Perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dalam peraturan pemerintah
- Penyisipan satu pasal di antara Pasal 120 dan Pasal 121, yakni Pasal 120a tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan atau post legislative security yaitu 3 tahun setelah pengundangnya, pemerintah melaporkan Undang-undang ini kepada DPR RI
- Perbaikan rumusan teknis redaksi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 50, Pasal 67, Pasal 78, dan Pasal 86.

Jawab Keberatan Anwar Usman soal Ketua MK Suhartoyo

MK: Saat Penentuan yang Mulia Anwar Usman Hadir

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjawab keberatan yang dilayangkan oleh Hakim MK Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, surat jawaban tersebut berisikan hasil rapat per-musyawaratan hakim (RPH).

"Berkenaan dengan adanya surat keberatan yang disampaikan kuasa hukum Yang Mulia Anwar Usman mengenai SK pengangkatan Ketua MK yang baru karena dianggap ada kegagalan dalam putusan MKMK, telah dijawab oleh pimpinan MK berdasarkan hasil RPH," kata Enny kepada Wartawan, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, surat balasan sudah dikirimkan ke kuasa hukum Anwar Usman. Lebih lanjut Enny menyampaikan, dalam proses penentuan Suhartoyo sebagai Ketua MK, Anwar Usman ikut hadir. Selain itu, pengangkatan Ketua MK periode 2023-2028 sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam proses penentuan secara musyawarah mufakat Ketua MK yang baru juga dihadiri langsung oleh Yang Mulia Anwar Usman," katanya. "Pada prinsipnya pengangkatan Ketua MK periode 2023-2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," kata Enny menambahkan

Suhartoyo sendiri disepakati menjadi Ketua MK melalui musyawarah mufakat para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup, Kamis (9/11/2023). MK mengonfirmasi, semua hakim konstitusi hadir di dalam rapat tersebut, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Akan tetapi, imbas pelanggaran etik berat, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Pelanggaran etik berat itu terkait putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang memberhentikan Anwar dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. MKMK saat itu menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Bentuk MKMK Permanen

Laporan dugaan pelanggaran etik



Masa kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berakhir Jumat besok (24/11/2023). Tampak Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie (kiri) melambikan tangan usai memutuskan mantan Ketua MK, Anwar Usman melanggar kode etik. (dok.ant)

Hakim Konstitusi Anwar Usman masih terus berlanjut. Padahal, dia sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, MK akan segera membentuk MKMK baru lantaran MKMK yang saat ini dipimpin Jimly Asshiddiqie bersifat ad hoc dan akan berakhir masa tugasnya besok, Jumat (24/11/2023).

"Sesuai dengan pidato perdana Ketua (MK, Suhartoyo), MKMK akan dibentuk permanen karena MKMK yang sekarang bersifat ad hoc," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Sebelumnya, Jimly bersama Wahiduddin Adams dan Bintang Saragih diangkat sebagai anggota MKMK menangani 21 perkara pelanggaran etik hakim konstitusi berkenaan dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Hasilnya, MKMK menetapkan sembilan hakim konstitusi melanggar etik dengan sanksi teguran lisan secara kolektif. Para hakim konstitusi dinyatakan melanggar kode etik lantaran mereka terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Per-musyawaratan Hakim (RPH).

Menurut MKMK, pelanggaran benturan kepentingan dinilai sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar karena para hakim membiarkan terjadinya praktik pelanggaran kode etik tanpa saling mengingatkan.

Selain itu, MKMK juga menyatakan Anwar Usman yang saat itu menjadi Ketua MK melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim. Alhasil, Anwar harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Terbaru, Anwar Usman dilaporkan Advokat-advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) lantaran diduga kembali melakukan pelanggaran kode

etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

"Pasca diberhentikan dari jabatan Ketua MK, AU (Anwar Usman) masih terus bermanuver murahan yang semakin merusak marwah MK di mata publik," kata Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/11/2023).

Ia lantas menyinggung isi konferensi pers Anwar Usman usai dipecat sebagai Ketua MK. Dari belasan butir pernyataan Anwar Usman, mayoritas berisi mendiskreditkan pimpinan-pimpinan MK terdahulu. "AU juga dengan enteng membawa-bawa nama Tuhan soal jabatan Ketua MK. Namun sekarang malah menolak putusan MKMK tanpa dasar hukum. Keberatan AU terhadap pelantikan Ketua MK Suhartoyo juga tanpa alasan hukum sama sekali," sambungnya.

Petrus menilai, sikap Anwar Usman tersebut menunjukkan ketidaksiapan melepas jabatan sebagai Ketua MK. Anwar Usman juga dianggap tidak konsisten. Jika tidak terima dengan pemecatan sebagai Ketua MK, Anwar Usman seharusnya mengajukan banding. Namun hal ini juga tidak dilakukan oleh ipar Presiden Joko Widodo ini.

"Malahan, AU lebih bernafsu mengumbar aib-aib MK dan memfitnah koleganya sendiri melalui apa yang disebutnya 'trial by the press'," lanjut Petrus.

Maka dari itu, Advokat-Advokat Perekat Nusantara dan TPDI yang terdiri dari Petrus Selestinus, Erick S Paat, Carrel Ticalu, Robert B Keytumu, Pitri Indrianingtyas, Roslina Simangunsong, dan beberapa lainnya melampirkan kembali Anwar Usman ke MKMK. "Laporan ini agar sebelum diberhentikan dari Hakim Konstitusi secara permanen, AU dinonaktifkan sementara hingga putusan MKMK definitif," tutupnya. (wid,rls, ant,ist/dya)

DASAR - DASAR PEMBENTUKAN MKMK

- Amanat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: "Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi...".
- Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada 3 Februari 2023, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023). MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

PROFIL SINGKAT KETUA MK SUHARTOYO

- **Tempat/Tanggal Lahir:** Sleman
- **Pendidikan:**
 - S-1 Universitas Islam Indonesia (1983)
 - S-2 Universitas Taruma Negara (2003)
 - S-3 Universitas Jayabaya (2014)
- **Karier:**
 - Calon Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung (1986)
 - Hakim Pengadilan Negeri Curup (1989)
 - Hakim Pengadilan Negeri Metro (1995)
 - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi (1999)
 - Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (2001)
 - Ketua Hakim Pengadilan Negeri Praya (2004)
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (2006)
 - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak (2009)
 - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur (2011)
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2011)
 - Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar (2014)



Mentan Targetkan Peningkatan Produksi Beras Nasional Pada Masa Tanam I



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat tanam padi di Tuban, Kamis (23/11/2023).

TUBAN – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan adanya peningkatan produksi beras Nasional pada masa tanam I yaitu Oktober 2023 – Maret 2024. Untuk mencapai target itu, maka dia menyerukan Gerakan Tanam Culik pada Masa Tanam.

“Ini namanya 'tanam culik'. Artinya selesai panen, langsung kita tanam. Ini tujuannya untuk meningkatkan produksi dan menekan importasi,” kata Amran saat melakukan panen dan tanam padi di Desa Ngadipuro dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (23/11/2023).

Gerakan panen dilakukan di lahan 77 hektare dengan produksi rata-rata 7,5 sampai 8 ton/hektare. Sementara itu, gerakan tanam dilakukan di lahan seluas 388 hektare. Dalam kegiatan kali ini Mentan Amran, Gubernur Jawa Timur, Bupati serta petani Tuban menanam padi varietas Inpari 32. “Yang kita tanam hari ini Insya Allah akan kita panen pada bulan kedua 2024, Februari,” ujar Amran.

Rencananya petani di Kecamatan Widang menanam padi di lahan 3.750 hektare pada bulan November dan 3.250 hektare pada bulan Desember. Petani di Kabupaten Tuban juga akan menanam padi di lahan 7.000 hektare pada bulan November dan 12.000 hektare di bulan Desember.

Amran mengapresiasi kerja keras petani di Kabupaten Tuban yang secara konsisten telah membantu meningkatkan stok cadangan beras nasional. “Nomor 1 penyuplai beras di Indonesia, surplus. Nomor 1 penyuplai jagung di Indonesia. Kita bisa menyuplai pangan Indonesia dari Tuban,” tuturnya.

“Ini pangan harus kita jaga. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Saya yakin kita bisa tingkatkan produksi dengan kebersamaan kita semua,” tambah Amran.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan pemerintah untuk bersama-sama membangun pertanian Jatim dan Indonesia lebih baik lagi. Hal ini bukan tanpa sebab lantaran Jawa Timur adalah provinsi dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia.

“Dengan semangat mewujudkan kedaulatan pangan nasional, mari kita bangun bersama-sama pertanian di Jawa Timur dan Indonesia untuk menjadi lebih baik,” kata Gubernur Khofifah.

Ia menjelaskan saat ini Jawa Timur mampu menyuplai hampir 80 persen kebutuhan pangan ke 16 provinsi yang ada di Indonesia Timur. Dimana, secara year-on-year September 2022/2023 Jawa Timur surplus 9,23%. Dan selama 4 tahun berturut-turut sejak 2020 sampai dengan 2023 Jatim juga merupakan produsen Padi tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.

“Berdasarkan Angka Sementara BPS, tahun 2023 ini Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai penghasil padi terbesar nasional dengan produksi sebesar 9,59 juta ton GKG, dan memiliki kontribusi sebesar

17,89% terhadap produksi padi nasional. Dan ini sudah empat tahun berturut-turut dari 2020,” terangnya.

Orang nomor satu di Jatim ini mengatakan berbagai capaian Jawa Timur di sektor pertanian adalah buah dari sinergitas seluruh tim. Mulai dari petani, gabungan kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah setempat juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian.

“Sinergitas luar biasa, PPL nya luar biasa, sampai bupati nya luar biasa dan tentu PPL yang punya peran untuk bisa melakukan pendampingan dan memberikan guidance kepada para petani kapan percepatan musim tanam,” katanya.

Secara khusus Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Kabupaten Tuban memiliki inovasi yang luar biasa terkait uji coba pupuk dengan komposisi pupuk organik lebih maksimal. Petani di Tuban adalah gambaran petani di Jawa Timur yang tangguh. Ia mengungkapkan bahwa di beberapa titik perbandingan penggunaan pupuk organik dan kimia sudah 4 banding 1.

“Jadi 20% saja pupuk kimia, 80% sudah pupuk organik dengan posisi seperti itu produksinya bisa mencapai 9 ton per ha bahkan sempat 12 ton per

ha. Itu artinya operasional cost juga berkurang tapi produktivitasnya meningkat,” ucapnya.

“Ini keren sekali bisa dijadikan referensi tidak hanya di Kabupaten Tuban tapi juga di daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyinggung tentang lelang pasca panen yang dilakukan di lahan panen di Kabupaten Tuban. Menurutnya hal ini akan berdampak positif pada harga GKP.

“Menurut saya yang sangat advance adalah lelang pasca panen, jadi GKP itu langsung di lelang dan itu saya saksikan sendiri dua minggu lalu di Rengel tadi saya sampaikan ke Pak Menteri Pertanian Bagaimana lelang GKP di lahan area-area yang dekat dengan lahan panen keren sekali,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa untuk mengatasi kekeringan perlu dilakukan pemetaan terkait kebutuhan rumah pompa sehingga bisa mengantisipasi mundurnya masa tanam akibat kekeringan. Ia mengatakan telah melakukan diskusi bersama Menteri Pertanian terkait kebutuhan rumah pompa.

“Jadi bukan hanya pompa air, tapi rumah pompa karena ini sustainability harus lebih terjaga,” pungkasnya.

Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyampaikan, giat percepatan tanam akan didorong ke seluruh wilayah Jawa Timur. Upaya ini sangat tepat mengingat kondisi pangan dunia membutuhkan perhatian khusus karena dampak El Nino. Gerakan percepatan tanam ini sangat penting untuk menjaga agar produksi tersedia bagi masyarakat Jawa Timur dan juga untuk menopang provinsi-provinsi lain di luar Jawa Timur.

“Hadirnya Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya di Jawa Timur akan melakukan upaya khusus guna akselerasi peningkatan produksi padi dan jagung dan kita dukung penuh. Kita semua tidak bisa berjalan sendiri, dan perlu melakukan kolaborasi dan menjalankan aksi bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan,” jelas Gubernur Khofifah. (lut/dya)



“Ini namanya 'tanam culik'. Artinya selesai panen, langsung kita tanam. Ini tujuannya untuk meningkatkan produksi dan menekan importasi,”

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian (Mentan)

UMK Kabupaten Malang Diusulkan Naik Sekitar Rp 132 Ribu

MALANG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang saat ini telah menerima usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2024, sebesar 4,04 persen. Secara nominal kenaikannya sekitar Rp 132 ribu, yaitu dari Rp3.268.275 menjadi Rp3.400.182,59.

Diketahui, Jumlah usulan kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Malang, melalui rapat pleno yang terselenggara selama 2 hari, yakni pada 20-21 November 2023.

"Seluruh anggota dewan pengupahan aktif terlibat dalam proses ini, merumuskan formula dan regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2021," ujar Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (23/11/2023).

Yoyok menegaskan bahwa dalam mengusulkan kenaikan ini. Pihaknya sangat memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap investasi, ketenagakerjaan, serta stabilitas ekonomi daerah Kabupaten Malang.

"Harapannya justru agar mampu jadi daya tarik untuk mendatangkan investor, menampakkan investasi di Kabupaten Malang. Nah dengan

bahayanya investasi itu, harapannya mampu mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja," sambungnya.

Lebih lanjut, Yoyok mengaku bahwa usulan dari hasil rapat pleno tersebut, akan disampaikan kepada Bupati Malang, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengupahan Jawa Timur (Jatim) sebagai tahapan berikutnya.

"Proses ini melalui diskusi dan perdebatan yang cukup panjang. Namun pada akhirnya disepakati untuk menggunakan formula dengan alpha 0,20. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah usulan awal yang menghasilkan kenaikan sekitar 4,04 persen atau setara dengan Rp131.907,59 ribu jika dihitung dalam rupiah," terangnya.

Pasalnya, menurut Yoyok, keputusan akhir terkait besaran UMK di 2024 mendatang, akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Gubernur Jatim untuk penetapan resmi.

"Hasil rapat pleno ini akan direkomendasikan oleh bupati kepada gubernur untuk mendapatkan keputusan akhir. Semua tergantung pada keputusan dari Pemerintah Provinsi apakah kenaikan ini disetujui, dikurangi, atau dipertahankan," urainya.



Diakhir, Yoyok mengharapkan agar keputusan akhir dari Gubernur Jatim nantinya, dapat menjaga kelancaran mekanisme UMK dan membentuk lingkungan yang mendukung investasi di Kabupaten Malang. "Sehingga, hubungan akan terjalin aman kondusif dan produktif. Harapannya dapat menarik iklim investasi di Kabupaten Malang," tandasnya. (Santi/dya)



Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo. (Dok. Istimewa)

Hari Kesehatan Nasional Dinkes Kota Batu Gelar Health Expo, Beri Layanan Kesehatan Gratis

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menggelar kegiatan Health Expo, Kamis dan Jumat (23-24/11/2023) untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, Kartika Trisulandari mengungkapkan, Health Expo ini telah dilaksanakan untuk keempat kalinya berturut-turut. Dengan konsep expo yang menawarkan layanan kesehatan terintegrasi dan gratis bagi masyarakat.

"Konsepnya Expo dengan layanan kesehatan. Karena tahun depan arah kebijakan kesehatan itu integrasi layanan primer. Jadi ini kita buat layanan di kluster-kluster," ujar Kartika, ditemui saat pembukaan Health Expo Kota Batu, Kamis (23/11/2023).

Kartika menyebutkan, acara yang digelar di area Balai Kota Among Tani ini, terbagi atas tiga kluster layanan kesehatan. Yakni kluster layanan bagi warga lansia, ibu dan anak, serta remaja usia produktif atau calon pengantin (catin). Menurutnya, masing-masing kluster menyediakan layanan khusus yang dikemas dengan konsep yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta.

Dalam kluster lansia misalnya,



Salah satu layanan pijat relaksasi bagi lansia dalam kegiatan Health Expo peringatan HKN ke 59 di Kota Batu, Kamis (23/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

Kartika menyampaikan bahwa layanan kesehatan yang tersedia, meliputi layanan skrining pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, pijat relaksasi, hingga hiburan berupa musik kroncong dan pemutaran film jadul yang disiapkan khusus untuk para warga lansia Kota Batu.

"Kalau kluster lansia ini di dalam Graha Pancasila. Kemudian juga ada



Kepala Dinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, saat membuka kegiatan Health Expo dalam Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 59 di Pemkot Batu, Kamis (23/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

kluster ibu dan anak yang kita buat nyaman mungkin. Di situ ada kelas ibu hamil, ada layanan USG, kemudian baby massage, konsultasi, ada semua di sana," jelasnya.

Sementara itu menurutnya, kluster remaja usia produktif, menawarkan berbagai macam layanan kesehatan. Di antaranya yakni, skrining penyakit tidak menular, skrining layak hamil untuk calon pengantin, dan beragam

permainan menarik bagi balita.

"Semuanya gratis, silahkan dinikmati layanannya. Gak ada persyaratannya, siapapun bisa daftar, mau di kluster layanan yang mana saja," seru Kartika.

Lebih lanjut, dituturkan pula bahwa fokus layanan Health Expo tidak hanya pada satu penyakit tertentu, tetapi juga memberikan perhatian terhadap penyakit degeneratif yang umum terjadi pada lansia, seperti hipertensi dan gula darah.

"Targetnya yang pertama tentunya kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kedua, kita mengenalkan kepada masyarakat terkait pelayanan yang dimiliki Pemkot Batu," tutup Kartika.

Diakhir, dengan melibatkan tim nakes dari puskesmas, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan organisasi profesi. Kartika berharap agar Health Expo ini tidak hanya mampu memberikan layanan yang komprehensif, namun juga mampu menyebarkan informasi mengenai beragam layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat Kota Batu. (Santi/dya)

PELARI TRIYANINGSIH BERIKAN TIPS UNTUK LOMBA LARI



Mengikuti lomba lari seringkali dijadikan kesempatan untuk tampil stylish dengan sepatu baru. Namun, pelari elite nasional, Triyaningsih, memberikan saran berbeda.

MENURUTNYA, penggunaan sepatu baru saat lomba bisa berisiko menyebabkan hal-hal yang tak diinginkan, termasuk cedera.

Meskipun beberapa sepatu dapat menyesuaikan dengan kaki dengan cepat, perempuan yang pernah menyandang predikat "Ratu Lari Jarak Jauh Indonesia" itu menyarankan untuk tidak mengambil risiko.

"Karena kita belum tahu sejauh mana sepatu tersebut nyaman untuk digunakan," ujar Triyaningsih di Jakarta, Rabu.

Untuk berlari, kata Triyaningsih, diperlukan sepatu yang pas dan nyaman demi menunjang keselamatan.

Kaki adalah bagian tubuh yang paling sering mengalami tekanan, beban, dan rintangan setiap hari. Bahkan, tekanan pada kaki dapat meningkat 1,5 hingga 3 kali lipat saat berjalan cepat atau berlari.

Mengetahui bentuk kaki, kata peraih 11 medali emas SEA Games itu, sangat penting dalam menentukan jenis sepatu yang tepat untuk mengurangi beban pada kaki.

Triyaningsih menyarankan untuk mencoba sepatu minimal dua kali dengan jarak yang akan ditempuh saat lomba.

"Contohnya, jika lomba dengan

jarak 5 hingga 10 kilometer, coba sepatu tersebut selama latihan dengan jarak tersebut," ujarnya.

Triyaningsih mengungkapkan terdapat tiga tipe bentuk kaki yaitu pronated (flat foot), normal, dan supinated (high arch). Penggunaan sepatu untuk lari sebaiknya mengikuti tipe atau bentuk dari kaki.

Saat membeli sepatu, ia menyarankan untuk membeli langsung di toko yang khusus menjual sepatu dan menanyakan fitur-fitur tertentu sesuai dengan tipe kaki.

"Toko yang khusus menjual sepatu biasanya memiliki alat untuk menentukan tipe sepatu yang cocok sesuai dengan tipe kaki," katanya lagi.

Bagi pemula, Triyaningsih menyarankan pemilihan sepatu yang memiliki fitur stabilitas karena lebih dapat menyesuaikan bentuk kaki.

Untuk pelari yang ingin meningkatkan performa, ia menekankan pentingnya teknologi pada sepatu untuk mendukung performasaatberlari.

"Bagi pelari yang ingin meningkatkan performa, teknologi pada sepatu sangat perlu dipertimbangkan, karena bisa memberikan tambahan performa sekitar 10 persen untuklompatan," jelasnya.

Meskipun penampilan keren dengan sepatu baru sangat menggoda, kata Triyaningsih, kesehatan dan keselamatan kaki harus tetap menjadi prioritas utama bagi para pelari.

Profil

Triyaningsih kelahiran 15 Mei 1988 merupakan atlet lari jarak jauh putri Indonesia yang prestasinya

konsisten sejak turun bertanding.

Triyaningsih adalah pelari spesialis cabang atletik SEA Games atau Pesta Olahraga Asia Tenggara di tiga nomor lari yaitu 5.000 meter, 10.000 meter, dan maraton (42,195 kilometer).

Sebelum fokus di nomor 10 ribu, atlet yang juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu juga turun di nomor 5.000 meter dan marathon.

Minat Triyaningsih pada atletik muncul setelah mendapat dorongan dari sang kakak, Ruwiyati, yang sudah menjadi pelari terkenal. Triyaningsih kemudian berlatih di klub atletik Lokomotif di Salatiga sejak 2002.

Dia langsung di bawah pengawasan pelatih Alwi Mugiyanto, yang sejak awal sudah melihat bakat Triyaningsih sebagai pelari (Ant)



"Bagi pelari yang ingin meningkatkan performa, teknologi pada sepatu sangat perlu dipertimbangkan, karena bisa memberikan tambahan performa sekitar 10 persen untuk lompatan,"

TRİYANINGSIH

DEMENSIA, GEJALA, CARA MENCEGAH, DAN MENGATASINYA

DEMENSIA merupakan kondisi medis hilangnya fungsi kognitif seperti, berpikir, mengingat, dan bernalar yang mengganggu kehidupan dan aktivitas penderitanya.

Tingkat demensia yang paling ringan, ketika penyakit ini baru menyerang, hingga tahap yang paling parah saat penderita bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk aktivitas dasar kehidupan sehari-hari.

Demensia lebih umum terjadi karena penambahan usia sekitar sepertiga dari orang yang berusia 85 tahun atau lebih, tetapi hal ini bukan merupakan bagian normal dari penuaan. Ada beberapa bentuk demensia yang berbeda, Alzheimer merupakan bentuk paling umum.

APA SAJA TANDA DAN GEJALA DEMENSIA?

Tanda dan gejala demensia terjadi ketika neuron (sel saraf) di otak yang tadinya sehat lalu berhenti bekerja, kehilangan koneksi dengan sel otak lain, hingga mati. Setiap orang kehilangan beberapa neuron seiring bertambahnya usia, namun pada penderita demensia angkanya lebih besar.

TANDA DAN GEJALANYA DEMENSIA, BERIKUT BEBERAPA CONTOHNYA:

1. Kehilangan ingatan dan kebingungan
2. Kesulitan berbicara, memahami dan mengungkapkan pikiran
3. Berkeliaran dan tersesat di lingkungan yang familiar
4. Kesulitan menangani uang secara

bertanggung jawab dan membayar tagihan

5. Pertanyaan berulang

6. Menggunakan kata-kata yang tidak biasa untuk tertuju pada objek yang familiar

7. Membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari

8. Kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari

9. Berhalusinasi, mengalami delusi, hingga paranoia

10. Bertindak impulsif

11. Tidak peduli dengan perasaan orang lain

12. Kehilangan keseimbangan dan masalah pergerakan

Belum diketahui secara pasti bagaimana pencegahan demensia, namun menjalani gaya hidup sehat mampu membantu mengurangi faktor risiko. Berikut beberapa contohnya:

1. Aktivitas fisik

Melakukan aktivitas fisik secara teratur merupakan cara terbaik guna mengurangi risiko demensia. Hal ini bagus untuk kesehatan jantung, sirkulasi, berat badan, sampai kesehatan mental Anda. Disarankan melakukan aktivitas fisik seperti aerobik dan aktivitas membangun kekuatan.

2. Konsumsi Makanan Sehat

Pola makan seimbang bisa mengurangi risiko demensia. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi menimbulkan kemungkinan besar Anda mendapat semua nutrisi yang dibutuhkan otak agar tetap sehat.

3. Jangan merokok

Kebiasaan merokok dapat membuat timbulnya risiko yang lebih tinggi terkena demensia di kemudian hari. Merokok berdampak buruk bagi peredaran darah ke seluruh tubuh seperti, pembuluh darah di otak, jantung, dan paru-paru.

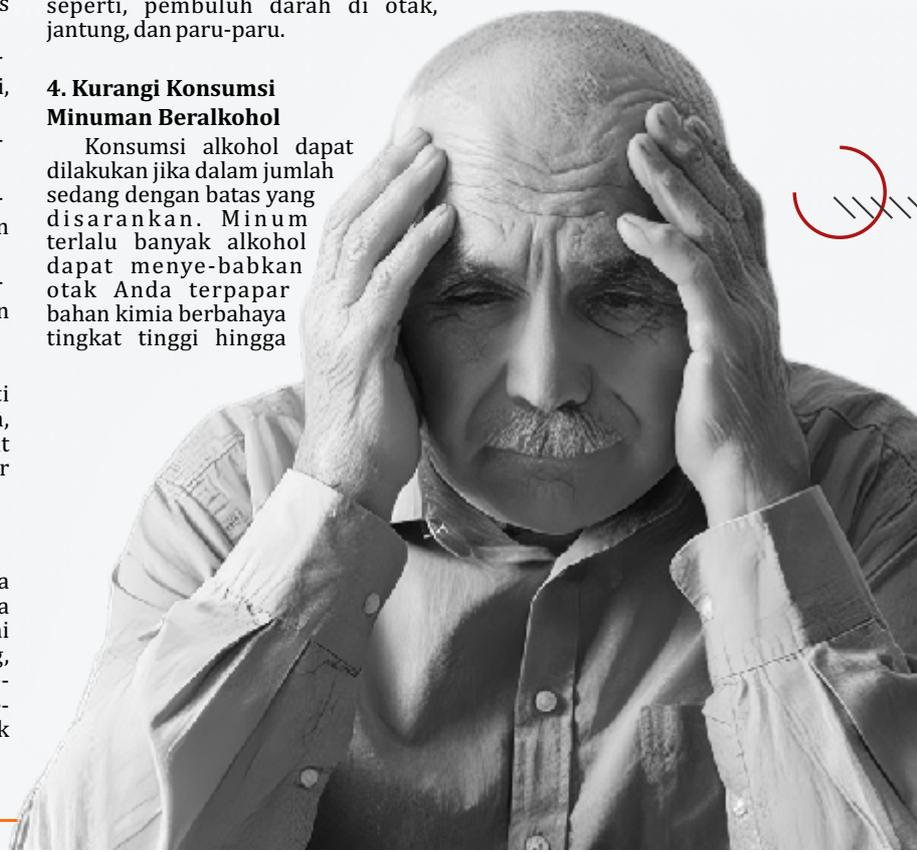
4. Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol

Konsumsi alkohol dapat dilakukan jika dalam jumlah sedang dengan batas yang disarankan. Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan otak Anda terpapar bahan kimia berbahaya tingkat tinggi hingga

mengalami kerusakan otak atau organ lain, sehingga meningkat-kan risiko demensia.

5. Rutin Cek Kesehatan Secara Berkala

Seiring bertambahnya usia, mungkin Anda akan mengalami kondisi kesehatan tertentu, seperti tekanan darah tinggi atau diabetes dan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terkena demensia. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengurangi risikonya (Bisnis)



MUSIM HUJAN, JANGAN ABAIKAN KONDISI KARET WIPER



BERKENDARA mobil saat hujan tentunya berbeda dengan kondisi normal. Paling terasa dari sisi visibilitas atau daya pandang yang otomatis menurun.

Karena itu, pengemudi wajib lebih berhati-hati dan memastikan semua komponen mobil berfungsi dengan baik. Paling utama yang membantu visibilitas saat hujan adalah wiper.

Penting bagi pemilik dan pengguna mobil memastikan kondisi wiper masih prima, terutama pada bagian karet yang memiliki kegunaan untuk menyapu air di bagian kaca.

Komponen wiper pada mobil berperan penting untuk menjaga visibilitas pengemudi tetap jelas, terutama di musim hujan.

Sayangnya, komponen berbahan karet itu kerap disepelkan atau jarang mendapatkan perawatan dari pemilik mobil. Padahal, jika wiper dipaksa bekerja dalam kondisi rusak, bisa menyebabkan lecet pada kaca dan berpotensi menimbulkan kecelakaan karena pandangan pengemudi terganggu.

"Salah satu komponen penting di musim hujan yang kerap terlupakan adalah wiper. Begitu wiper bermasalah, AutoFamily tidak dapat mengemudi dengan aman dan nyaman," kata Nur Imansyah Tara, Aftersales Business Division Head Auto2000 dalam siaran resmi, Minggu.

"Dampak buruk lainnya adalah kaca mobil baret yang sulit dihilangkan," kata dia.

Ia kemudian menjelaskan empat tanda wiper mobil mengalami kerusakan, berikut ulasannya:

Tidak optimal menyeka air

Penyeka kaca yang kondisinya masih bagus akan bekerja optimal dalam membersihkan air. Namun, wiper yang rusak tidak akan sanggup menyeka air dengan baik, terutama ketika hujan deras.

Kerusakan umumnya terjadi pada bilah pemegang karet wiper yang lemah pegasnya sehingga wiper gagal mengikuti kontur kaca saat bekerja dan meninggalkan jejak air.

Suara wiper berisik

Wiper yang kondisinya masih bagus ditandai oleh karet yang masih

lentur dan tidak keras. Seiring waktu dan pemakaian, karet wiper akan semakin kaku dan kehilangan fleksibilitas.

Biasanya, karet wiper yang sudah mengeras akan menimbulkan bunyi berisik atau berdecit saat terjadi gesekan dengan kaca mobil.

Garis air di kaca

Karena sudah tidak lentur, akan muncul banyak garis-garis air pada kaca ketika wiper bekerja. Selain membuat sapuan air kurang maksimal, garis air juga akan mengakibatkan baret pada kaca mobil yang akan menghalangi pandangan keluar.

Jika didiamkan, baret akan semakin parah dan membuat kaca mobil rusak.

Gerakan wiper tak lancar

Jika karet dalam kondisi masih bagus, gerakannya akan terasa lancar. Tapi ketika karet sudah keras, maka saat wiper dinyalakan gerakannya saat menyapu air bakal tersendat-sendat. Bahkan dapat membuat bilah wiper patah akibat terlalu sulit bergerak.

Sama dengan ciri-ciri lainnya, sapuan wiper tidak akan maksimal sehingga mengganggu pandangan dan membuat kaca mobil rusak kalau didiamkan.

Bila memang kondisinya sudah tidak optimal lagi, lebih baik segera melakukan pergantian karet wiper. Karena bila didiamkan justru akan membuat kerugian bagi pengemudi.

Sebaiknya pemilik mobil melakukan pergantian karet wiper secara berkala karena adanya usia dalam pemakaiannya. B

Pergantian karet wiper tak perlu menunggu kondisinya sudah mengeras atau getas. Karena bila demikian, dan suatu-waktu digunakan, dikhawatirkan justru bisa merusak lapisan kaca (berbagai sumber)



5 NEGARA DENGAN BIAYA PERAWATAN

KESEHATAN TERMAHAL DI DUNIA

SEJAK pandemi melanda dunia, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat tajam.

Negara-negara berpenghasilan tinggi termasuk Jerman, Swiss, Austria, dan Amerika Serikat cenderung mengeluarkan lebih banyak biaya per orang untuk perawatan kesehatan dan biaya terkait.

Sebagian besar negara maju mengelola biaya perawatan kesehatan menggunakan intervensi pemerintah dengan menegosiasikan biaya yang lebih rendah untuk obat-obatan, peralatan, dan perawatan rumah sakit.

Dikutip dari Insider Monkey, berikut adalah 5 negara dengan biaya perawatan kesehatan termahal di dunia:

1. AMERIKA SERIKAT

Pengeluaran biaya kesehatan per kapita: US\$12,553 (Rp195 juta)

Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan biaya perawatan kesehatan termahal di dunia.

Tingginya pengeluaran untuk perawatan kesehatan dapat dikaitkan dengan populasi berusia lanjut dan meningkatnya biaya layanan kesehatan.

2. SWISS

Pengeluaran biaya kesehatan per kapita: US\$8,049 (Rp125 juta)

Swiss mempertahankan standar perawatan yang tinggi yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Di antara negara-negara Eropa lainnya, Swiss menghabiskan sebagian besar PDB-nya untuk perawatan kesehatan sehingga menjadikannya salah satu negara dengan perawatan kesehatan termahal di dunia.

Tingginya biaya administrasi dan layanan kesehatan juga mendorong tingginya anggaran kesehatan.

3. JERMAN

Pengeluaran biaya kesehatan per kapita: US\$8,010 (Rp124 juta).

Pengeluaran untuk perawatan kesehatan terus meningkat di Jerman.

Sementara asuransi kesehatan publik berbasis pendapatan, asuransi swasta relatif mahal dan tersedia bagi mereka yang berpenghasilan di atas rata-rata pendapatan Jerman.

Oleh karena itu, Jerman termasuk salah satu negara dengan biaya perawatan kesehatan yang mahal.

4. NORWEGIA

Pengeluaran biaya kesehatan per kapita: US\$7,771 (Rp121 juta)

Norwegia memiliki salah satu biaya perawatan kesehatan tertinggi di dunia. Negara ini memiliki sistem perawatan kesehatan yang dapat diakses dan dikembangkan yang relatif mahal.

5. AUSTRIA

Pengeluaran biaya kesehatan per kapita: US\$7,275 (Rp113 juta)

Asuransi kesehatan adalah hal wajib di Austria dengan jaminan yang tinggi. Pengeluaran kesehatan di negara ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Uni Eropa

lainnya.

Populasi yang semakin menua dan meningkatnya risiko penyakit juga berkontribusi pada pengeluaran kesehatan Austria.

Oleh karena itu, Austria termasuk dalam 20 negara dengan biaya perawatan kesehatan yang cukup mahal di dunia (Bisnis)



KPK Tak Malu .. (dari Hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak malu ketuanya, Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL dan penerimaan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dirinya tak malu karena asas praduga tak bersalah dalam kasus Firli Bahuri ini. "Apakah kami malu? Saya pribadi tidak! Karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti, Pak (Johanis) Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti, itu yang harus dipegang," ujar Alex dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (23/11/2023).

Termasuk soal kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak terkait pembocoran dokumen penyidikan kasus di Kementerian ESDM, Alex menyebut hal itu tak terbukti. "Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah, itu dulu yang kita pegang," Alex menambahkan.

Alex menyebut, status Firli Bahuri masih tersangka, belum terpidana dan dinyatakan bersalah. Lagipula, Alex berpedoman pada pernyataan Firli yang kerap mengaku tak menerima suap maupun pemerasan.

"Masyarakat menilai? Masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka? Oke, tetapi, sekali lagi ini baru tahap awal, nanti, masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan, itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda, tidak berhenti di sini," kata Alex.

Sebelumnya, ada pimpinan KPK yakni Lili Pintauli Siregar yang mundur karena kasus etik dugaan penerimaan gratifikasi. Meski tidak terbukti, karena dia memilih mundur sebelum Dewas merampungkan sidang putusan terhadap etikanya.

Kemudian ada juga Wakil KPK, Johanis Tanak yang diduga berhubungan dengan pihak berperkaranya. Meski Dewas menyatakan Tanak tidak terbukti, karena Dewas tidak bisa membuktikan adanya komunikasi yang hilang antara dia dan pihak berperkaranya.

Johanis Tanak sendiri mengatakan sebagai sesama rekan pimpinan KPK, dia mengingatkan Firli untuk taat pada proses hukum. "Kita harus taat asas hukum yang cukup banyak, antara lain negara Indonesia adalah negara Hukum, setiap warga harus taat terhadap hukum, setiap orang harus menghormati proses hukum," kata Johanis dikonfirmasi, Kamis (23/11/2023).

Namun, Johanis menegaskan selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Setiap orang dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan lain," tegas Johanis.

Johanis pun menegaskan, pihaknya sampai saat ini tidak meminta Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan Ketua KPK. Meski sudah menyandang status tersangka oleh

Polda Metro Jaya. "Tidak ada permintaan seperti itu (mundur dari jabatan Ketua KPK)," cetus Johanis.

Sementara, pihak Firli merasa keberatan dengan penetapan tersangka itu. "Yang pertama kami keberatan ya. Sebagai kuasa hukumnya, kami keberatan atas penetapan tersangka Pak Firli," kata kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, Kamis (23/11/2023).

Ian mengatakan penetapan tersangka Firli Bahuri terkesan dipaksakan. Dia juga mengatakan alat bukti yang disita penyidik dalam kasus tersebut tidak pernah diperlihatkan. "Alasannya, satu, itu dipaksakan. Kedua, alat bukti yang menurut mereka sudah disita itu, itu tidak pernah diperlihatkan," ujarnya.

Ian menambahkan sudah berkomunikasi dengan Firli Bahuri sejak penetapan tersangka malam tadi. Hasilnya, Firli Bahuri akan melakukan perlawanan terkait status tersangka yang ada. "Intinya, kita akan melakukan perlawanan," imbuhnya.

Soal bukti, penyidik Polda Metro Jaya mengatakan telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan ini. Salah satu bukti yang diamankan berupa penukaran valuta asing (valas) senilai Rp 7,4 miliar. "Dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Menurut Ade Safri, barang bukti yang disita penyidik dijadikan dasar Firli Bahuri dijadikan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan. Hanya saja, Ade Safri belum dapat menyampaikan apakah dokumen penukaran valas senilai Rp 7,4 miliar itu merupakan uang hasil dari pemerasan atau gratifikasi yang diterima Firli Bahuri.

Polisi dan Dewas Bersurat ke Jokowi

Sementara itu, Dewas KPK bakal menyurati Presiden Jokowi. Surat tersebut terkait pemberhentian sementara Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK. Dewas KPK merujuk Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Pimpinan KPK diberhentikan sementara bila menjadi tersangka tindak pidana. Masih dalam pasal yang sama, pemberhentian itu ditetapkan oleh Presiden.

"Ya, [surat] dikirim hari ini jika sudah ada surat penetapan tersangka secara resmi dari Polda," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Pihak Istana pun menyatakan bahwa pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK segera diproses. Namun, Istana masih menunggu administrasi dari Polri. "Kemensetneg masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, maka akan diproses menurut peraturan perundang-undangan," kata Koordinator Staf

Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan. Menurut Ari, nantinya Presiden bakal mengeluarkan Keppres terkait pemberhentian sementara Firli Bahuri.

Pimpinan KPK Saling Sandera

Terpisah, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menduga orang-orang di sekitar Ketua KPK Firli telah mengetahui perilaku buruknya sebelum akhirnya terungkap terlibat dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Namun, mereka terkesan membiarkan karena patut dicurigai sama-sama 'bermain' kasus di KPK.

"Ada beberapa kemungkinan; pertama kalau melihat konpers terakhir yang dilakukan FB, seperti FB memang bekerja sendiri (di kasus pemerasan SYL). Orang-orang di sekitarnya sebenarnya mengetahui perilaku FB tapi melakukan pembiaran, indikasinya karena bukan yang pertama FB dilaporkan, atau bisa jadi masing-masing punya 'mainan' sendiri-sendiri. Sehingga saling sandera kasus," kata Bambang, Kamis (23/11/2023).

Di sisi lain, Bambang juga menyoroti kinerja Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Menurutnya, Dewas KPK semestinya dapat bekerja maksimal untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap Firli yang telah beberapa kali dilaporkan.

"Kewenangan yang terbatas hanya memberi sanksi etik saja, harusnya tak mengurangi ketegasan Dewas untuk menjaga marwah KPK," ujar Bambang.

Bambang lantas berpendapat, terungkapnya kasus pemerasan Firli terhadap SYL selaku tersangka korupsi yang ditangani KPK semestinya bisa dijadikan pintu masuk bagi Polri untuk mendalami lagi terkait adanya dugaan korban pemerasan Firli lainnya. Meski hal ini diakuinya sulit mengingat korban belum tentu berani melapor. "Cuma problemnya apakah korban juga bersedia melaporkan bila juga mendapat benefit dari FB? Misalnya, kasus korupsinya tidak diproses," tuturnya.

Bambang menambahkan, KPK sudah seharusnya kekinian berusaha berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Salah satunya dengan mengusut tuntas kasus-kasus yang diduga terhenti karena adanya intervensi Firli. "Kalau mau serius membangun kepercayaan kembali pada KPK, penetapan status tersangka FB bisa dijadikan momentum berbenah, untuk membuka kembali kasus-kasus yang diduga berhenti karena perilaku tak etis ketua KPK," jelasnya.

Sementara keheranan dikatakan Mantan Komisiner KPK Abraham Samad. Para pemimpin KPK tampak membela Firli meski sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Polda Metro Jaya.

Samad menilai, sikap Wakil KPK, Alex yang tak malu dan tak mau meminta maaf atas apa yang terjadi dengan Firli Bahuri sama seperti melindungi sebuah kejahatan. "Saya sekali lagi, saya mengingatkan orang

yang bernama Alexander Marwata bahwa keterangan yang anda sampaikan itu memberi kita petunjuk bahwa anda sedang melindungi yang namanya kejahatan. Karena anda tidak dengan legowo menyatakan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Samad di gedung KPK, Kamis (23/11/2023).

Samad menilai, proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri sudah sesuai prosedur. Menurut Samad, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi KPK sudah benar dan tidak perlu diperdebatkan.

"Sangat tidak mungkin lagi kita perdebatkan bahwa Firli ini adalah korban. Firli ini bukan korban. Firli ini adalah penjahat yang paling sadis," kata Samad.

"Kenapa saya katakan penjahat yang paling sadis? Bayangkan dalam tindak pidana korupsi kalau kita lihat urutan-urutannya ada kejahatan gratifikasi, suap, pemerasan dan sebagainya. Tingkatan yang paling sadis itu adalah pemerasan," lanjutnya.

Samad menyarankan Polda Metro Jaya segera menangkap dan menahan Firli. Pasalnya, menurut Samad, selama ini Firli Bahuri terlihat memperlambat proses hukum pemerasan Syahrul Yasin Limpo karena beberapa kali mangkir panggilan polisi. (wid,rls, ant,kum/dya)

PASAL BERLAPIS JERAT FIRLI

Pasal 12e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 12B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 65 KUHP

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambahkan se-pertiga.





DPRD JATIM DUKUNG PENUH ATLET SEPAK BOLA AMPUTASI RAIH PRESTASI



Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih foto bersama para atlet sepak bola amputasi yang akan bertanding di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian dan dukungan penuh pada para atlet Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia (PSAI) Asprov Jawa Timur. Sejahter ini, dukungan untuk mereka, baik dari pemerintah maupun pihak lain, masih sangat minim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, mengatakan bahwa potensi sepak bola amputasi Jatim cukup bagus, bahkan sudah menembus peringkat 22 dunia. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi dan sekaligus memberangkatkan tiga kontingan untuk bertanding di Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia Piala Menpora tahun 2023 di Jakarta pada 23 hingga 28 November 2023.

“Dalam kesempatan ini, kami melepas dan mendengar curhatan dari tiga kontingan sepak bola amputasi di Jatim yang berangkat untuk Piala Menpora di Jakarta dari tanggal 23 sampai 28 nanti. Mereka dari Madura, Malang dan Surabaya,” kata Hikmah, Kamis (23/11/2023).

Lebih lanjut, Hikmah menandakan bahwa sesungguhnya yang berpotensi untuk ikut dalam Kompetisi Sepak Bola Amputasi Nasional Piala Menpora itu ada 8 kontingan, sayangnya lima kontingan lain terpaksa absen karena ketiadaan dana. Untuk itu, Hikmah berharap pemerintah kota dan kabupaten untuk kedepannya lebih peduli lagi terhadap pembinaan para atlet.

“Agar kawan-kawan pesepak bola amputasi ini mendapatkan respon yang lebih baik. Hari ini mereka berangkat. Alhamdulillah dibantu

banyak pihak, Pak Sekda, Dispora, Dinsos, KONI, DPRD, mereka urunan semuanya dari kawan-kawan DPRD termasuk beberapa yang punya Dapil juga ikut menyumbang,” tandasnya.

Lebih lanjut, Hikmah yang merupakan politisi dari Malang ini mengatakan bahwa ke depannya PSAI mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Hikmah pun berjanji akan membawa aspirasi tersebut dengan mengetuk dari pintu ke pintu para bupati dan wali kota secara langsung, supaya mereka memberikan perhatian pada PSAI di daerahnya.

Terkait dengan keberangkatan tiga kontingan untuk bertanding ditingkat nasional, Hikmah berharap mereka mampu meraih prestasi segemilang mungkin. Kemudian, mereka juga bisa pulang dengan sehat.

“Tadi hadir dari KONI Bang Nabil, Dinsos, Sekretariat DPRD Jatim dan semua mendukung dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kawan-kawan kita, saudara kita yang semangat menghidupkan olah raga di tengah keterbatasan mereka. Kita sangat bersyukur, mereka menunjukkan ketangguhan sebagai anak bangsa yang ikut menguatkan dan menjaga nama marwah Jatim, menjaga kondusifitas olah raga dengan penuh sportif di tengah keterbatasan mereka. Kita senang dan bangga, semoga mereka pulang dengan semangat dan sehat,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ketua KONI Jatim, M Nabil juga memberikan dukungan penuh pada para atlet sepak bola amputasi di Jatim. Dia menandakan bahwa semua yang terkait dengan pengabdian dan

kehikmatan terhadap olah raga, maka mereka harus di-support dan diberi dukungan serta apresiasi apapun.

“Mereka adalah mewakili sebuah daerah dan nantinya mewakili Jatim, dan bahkan pada akhirnya kita masuk ranking 22 untuk sepak bola amputasi dunia. Bahwa, itu menunjukkan ada keseriusan, kesungguhan bagi mereka yang mengalami kekurangan secara fisik, tapi semangatnya tidak berkurang sama sekali, itu yang penting. Jadi, antara haru dan bangga,” tandasnya.

Nabil juga melihat semangat mereka yang sudah tidak bertanding mewakili individu masing-masing, tapi mewakili daerah di mana nantinya juga akan mewakili Jatim guna membawa nama baik Jatim. “Sehingga, ini memberikan inspirasi pada siapapun yang ingin berprestasi. Tentu harus latihan, harus ada kesungguhan dan serta keseriusan. Karena, itu semua yang terkait harus punya komitmen moral memberikan dukungan pada aktifitas mereka. Untung mereka ini melakukan sangat baik dan punya prestasi sangat baik secara fisik,” sambungnya.

Nabil menandakan, sebagai bentuk dukungan, KONI memberikan apresiasi pada mereka dengan melihat prestasi putra-putri terbaik yang ada di Jatim dan membawa nama baik Provinsi Jatim. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk bantuan dana untuk setiap kontingan yang akan bertanding ke Jakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua PSAI Asprov Jatim, Abdul Syukur mengatakan bahwa ada tiga tim dari Jatim yang akan bertanding di kompetisi nasional tersebut. Mereka adalah Persatuan Sepak Bola Amputasi Surabaya (Persas), Persatuan Sepak Bola Amputasi Malang (Persama) dan Persatuan Sepak Bola Amputasi Madura (Persam). Di mana satu tim ada 15 orang terdiri dari 12 pemain dan 3 official.

“Total ada tiga tim, nanti yang bertanding ada 6 tim seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Riau Jogjakarta. targetnya Jatim harus juara dan tiga tim ini target harus masuk semi final semua pada turnamen sepak bola amputasi piala Menpora kedua,” tandasnya.

Syukur mengatakan pihaknya mengharapkan support dari semua pihak termasuk dari DPRD Jatim. Sebab semuanya masih mandiri, dan belum ada campur tangan dari

pemerintah daerah dan Pemprov. “Bu Hikmah luar biasa, dan karena di Malang ya teman-teman Malang yang mendapatkan manfaat. Tapi kami ini bisa mengajak Surabaya dan Madura,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menandakan, selama ini intervensi pemerintah masih minim. Untuk itu, dia berharap setidaknya ada dana pembinaan, karena harus melakukan latihan rutin baik ada event maupun tidak ada event.

Dia berharap, kedepannya semoga ada liga sepak bola amputasi di Jawa Timur untuk saling kompetisi. Dengan demikian 8 tim yang ada di Jatim bisa saling bertemu dengan sistimnya bisa home away. “Itu harapan kami dan semua atlet Jatim. Sehingga setiap bulan ada pertandingan. Kalau sudah bergulir liga amputasi Jatim, saya rasa akan ada sponsorship,” katanya.

Terlebih lagi di Jatim sudah menjadi barometer dan mendominasi sepak bola amputasi di tanah air. Salah satu buktinya adalah Jember yang pertama kali ada dan sudah beberapa kali meraih juara 1.

“Dan beberapa kali pemainnya menjadi pencetak gol terbaik dan pemain terbaik, dan sayangnya Jember karena keterbatasan dana tidak bisa berangkat ke Jakarta. Mudah mudahan di lain kesempatan semua tim di Jatim bisa berperan dan ikut berangkat di segala macam turnamen,” harapnya.

Dia menyebutkan, Timnas Indonesia sudah masuk di putaran piala dunia. Bahkan pada Piala Dunia tahun 2022 di Turki, mampu berada di urutan 22 dari seluruh dunia.

Dia juga mengucapkan banyak terima kasih pada DPRD Jatim yang telah memberikan perhatian pada PSAI Asprov Jatim. Dia berharap perhatian tersebut akan menular ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.

Ketua Persas Surabaya, Endro Suseno, juga berharap ada keterlibatan pemerintah dalam pembinaan sepak bola amputasi. Dia menandakan selama ini belum bisa menembus ke pemerintahan dalam hal ini Dispora Surabaya, karena masih mempelajari mekanisme undang-undang dalam hal regulasi pembiayaan atau pendanaan. “Sehingga kami memohon petunjuk apa langkah kami selanjutnya sehingga bisa terfasilitasi pembinaan dari pemerintah,” tandasnya. (lut/dya/ADV)